

LAPORAN

PELAKSANAAN PEKAN SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK)

PERIODE 22 APRIL - 03 MEI 2024

LAPORAN HASIL PELAKSANAAN PEKAN SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI (22 April s.d 3 Mei 2024)



PEKAN SURVEI TAHUN 2024

DAFTAR ISI

DAF	TAR ISI	i
LEM	IBAR PENGESAHAN	ii
BAE	BI KUESIONER SURVEI	1
A.	Latar Belakang	1
B.	Tujuan Dan Sasaran	2
C.	Kuesioner Survei	2
BAB	B II METODOLOGI SURVEI	4
A.	Kriteria Responden	4
B.	Metode Pencacahan	6
C.	Metode Pengolahan Data dan Analisis	8
BAE	III PENGOLAHAN SURVEI	11
A.	Analisis Hasil Survei	. 11
B.	Tindak Lanjut Hasil Survei	.16
BAE	B IV DATA SURVEI	18
A.	Hasil Survei Dari Aplikasi Sisurti	18
B.	Data Responden	18
BAE	3 V PENUTUP	22
A.	Kesimpulan	22
B.	Rekomendasi	22
ΙΔΝ	IPIR AN	23

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN PEKAN SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 04 Tahun 2023 tentang Pengusulan dan Evaluasi Zona Integritas 2023 Dan

Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor : 809/DJA.1/OT1/IV/2024 Tentang Pengusulan Satuan Kerja Zona Integritas Di Lingkungan Peradilan Agama Tahun 2024

Kendari, 06 Mei 2024

Ketua Tim Survei

Mengetahui

Pengadilan Tinggi Agama Kendari

lame Sadafal, M.H.

1 1 1 1 1

Dra. Hj. Maryahah, S.H., M.H.I.

BABI

KUESIONER SURVEI

A. Latar Belakang

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Satuan Kerja pada Mahkamah Agung Republik Indonesia berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen terhadap pencegahan korupsi, Kementrian PAN dan RB telah menerbitkan Surat Edaran Menteri PAN&RB Nomor 04 tahun 2023 tentang Pengusulan dan Evaluasi Zona Integritas 2023. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan melakukan Survei Persepsi Anti Korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

Sebagai salah satu syarat untuk tercapainya akreditasi penjaminan mutu sebagai pengadilan yang berkualitas (ICPE) yaitu dengan mengadakan Survei Persepsi Anti Korupsi sebagai pedomannya yaitu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Mengingat jenis layanan publik sangat beragam dengan sifat dan karakteristik yang berbeda, maka Survei Persepsi Anti Korupsi dapat menggunakan metode dan teknik survei yang sesuai. Pengadilan merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar. Pengadilan Tinggi Agama untuk menjadi Pilot Project menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan di lingkungannya.

Zona Integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitikberatkan pada integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta selalu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

B. Tujuan Dan Sasaran

Maksud Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Pekan Survei Anti Korupsi pada pengadilan ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat.

Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Pekan Survei Persepsi Anti Korupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

C. Kuesioner Survei

Dalam pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi pada Pengadilan Tinggi Agama Kendaru kepada pengguna layanan, kuesioner yang disusun mengacu pada pedoman dari Kementerian PAN-RB. Daftar pertanyaan yang diajukan kepada responden adalah sebagai berikut :

	Pertanyaan	Jawaban
1.	Tidak ada diskriminasi pelayanan pada unit	nilai antara
	layanan ini	1 (★) s.d 4 (★)
2.	Tidak ada pelayanan diluar	nilai antara
	prosedur/kecurangan pelayanan pada unit	1 (★) s.d 4 (★)
	layanan ini	
3.	Tidak ada permintaan imbalan	nilai antara
	uang/barang/fasilitas diluar ketentuan yang	1 (★) s.d 4 (★)
	berlaku pada unit layanan ini	
4.	Tidak ada pungutan liar (pungli) pada unit	nilai antara
	layanan ini	1 (★) s.d 4 (★)
5.	Tidak ada percaloan/perantara tidak resmi pada	nilai antara
	unit layanan ini	1 (★) s.d 4 (★)

Keterangan:

Semakin banyak bintang menunjukkan bahwa setuju kualitas pelayanan pada unit layanan ini semakin baik.

BAB II

METODOLOGI SURVEI

A. Kriteria Responden

Pelaksanaan Pekan Survei Persepsi Anti Korupsi dilakukan terhadap responden yang datang ke Pengadilan Tinggi Agama Kendari, melalui meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), melalui website Pengadilan Tinggi Agama Kendari, Satuan Kerja di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Kendari dan/atau masyarakat yang mendapatkan manfaat layanan baik secara langsung maupun tidak langsung dari Pengadilan Tinggi Agama Kendari, serta memiliki Kriteria Pendidikan Minimal SLTA dan Memiliki Kriteria Pekerjaan sebagai berikut:

- 1. Pegawai Negeri Sipil (PNS)
- 2. Advokat
- 3. Wiraswasta
- 4. Pegawai Swasta
- 5. TNI/POLRI
- 6. Karyawan Honorer

Para responden yang sudah mengisi Survei Persepsi Anti Korupsi melalui aplikasi aplikasi Sisurti (Sistem Informasi Survei Terintegrasi) yang diakses melalui pada dapat laman link https://survei.badilag.net/home/index/9a9303aa1f9839be5b32bc64155ffbe9/ srv setelah dipetakan memiliki karakteristik sebagai berikut:

A.1. Tingkat Pendidikan Responden

Menurut tabel profil responden berdasarkan pendidikan terakhir pada pekan survei 2024, profil responden berdasarkan pendidikan terakhir, mayoritas adalah Diploma IV / Stara I sejumlah 38 orang atau 67,86% dari total responden. Sementara responden yang menduduki urutan terkecil yaitu Tingkat Pendidikan Sekolah Menegah Atas / Sekolah Menengah Kejurusan (Sederajat) sejumlah 1 orang atau 1,79% dari total responden

Tabel 1
Tingkat Pendidikan Responden

	Jumlah		Persentase	Persentase Kumulatif
Valid	SMA/SMK	1	0,00%	1,79%
	Diploma	0	0,00%	1,79%
	Diploma IV/S1	38	67,86%	69,65%
	S2	17	30,36%	100,00%
	S3	0	0,00%	100,00%
Total		56	100,00%	100,00%

A.2. Pekerjaan Responden

Berdasarkan tabel profil pekerjaan responden, menurut pekan survei pada tahun 2024, profil pekerjaan responden, mayoritas adalah Pegawai Negeri Sipil sejumlah 52 orang atau 95,16% dari total responden.

Tabel 2
Jenis Pekerjaan Responden

	Jumlah		Persentase	Persentase Kumulatif
Valid	PNS	52	92,86%	92,86%
	Advokat/Pengacara	0	0,00%	92,86%
	TNI/POLRI	1	1,79%	94.65%
	Karyawan Honorer	1	1,79%	96,43%
	Lainnya	2	3,57%	100,00%
Total		56	100,00%	100,00%

A.3. Kelompok Jenis Kelamin

Menurut tabel profil responden berdasarkan jenis kelamin pada pekan survei tahun 2024, profil jenis kelamin responden, mayoritas adalah laki-laki sejumlah sejumlah 49 orang atau 87,5% dari total responden. Sementara responden berjenis kelamin perempuan yaitu sejumlah 7 orang atau 12,50% dari total responden.

Tabel 3
Jenis Kelamin Responden

		Jumlah	Persentase	Persentase Kumulatif
Valid	laki-laki	49	87,5%	87,5%
	Perempuan	7	12,50%	100,00%
Total		56	100,00%	100,00%

B. Metode Pencacahan

Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

B.1. Populasi Dan Sampel

Populasi dalam survei ini adalah masyarakat yang menggunakan layanan di Satuan Kerja pengadilan Tinggi Agama Kendari. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik accidental sampling. Accidental sampling adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan Tim Survei dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.

B.2. **Lokasi Survei Dan Unit Analisis**

Lokasi survei adalah tempat dimana petugas melakukan survei terutama dalam menangkap kejadian atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari obyek yang diteliti agar didapat data-data survei yang akurat, dalam hal ini yaitu Kantor Pengadilan Tinggi Agama Kendari.

Unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti dalam hal ini adalah proses pemberian layanan di pengadilan.

B.3. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control

Data yang dipakai dalam survei ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui instrumen kuesioner yang diisi tanpa wawancara tatap muka dan berupa pilihan ganda (multiple choice) melalui Aplikasi Sisurti (Sistem Informasi Terintegrasi) dengan menu pengisian data responden, pengisian layanan yang diterima responden, pengisian kuesioner serta pengisian saran dan masukan sebagaimana terlampir (Lampiran I).

Pengumpulan data dilaksanakan pada rentang waktu 22 April – 03 Mei 2024 atau data minimal 30 responden. Selanjutnya data dikumpulkan oleh petugas pelaksana yang yang dibekali dengan pelatihan.

Kerja petugas pelaksana akan diawasi oleh pengawas (Wakil Ketua Pengadilan). Wakil Ketua Pengadilan akan mengecek kerja petugas pelaksana saat berkomunikasi responden, membagikan dan mengumpulkan kuesioner, meneliti kuesioner, serta sekaligus memastikan apakah responden benar-benar disurvei secara tepat oleh petugas, dan bertanggung jawab terhadap hasil perhitungan survei IPAK.

C. Metode Pengolahan Data dan Analisis

Analisis data untuk menentukan Indeks Persepsi Anti Korupsi menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1 – 4. Dimana nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani.

Data persepsi anti korupsi disajikan dalam bentuk skoring/angka absolut agar diketahui peningkatan/penurunan indeks persepsi anti korupsi masyarakat atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan Indeks Persepsi anti Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pertama, menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini. *Kedua*, mencari bobot rata-rata setiap indikator.

Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1 – 4 yang kemudian dikonversikan ke angka 0-100.

Skala indeks persepsi korupsi antara 1 – 4 yang artinya mendekati nilai 4 maka persepsi kualitas pelayanan makin baik BERSIH DARI KORUPSI.

C.1. Tahapan Pelaksanaan

Sebelum tim melakukan survei lapangan, dilakukan beberapa tahapan agar instrumen yang dipergunakan dapat diaplikasikan sesuai realitas lapangan. Adapun alur penyusunan tools untuk survei persepsi korupsi ini dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini

Gambar 1

Model alur penyusunan survei IPAK menuju Zona Integritas



Tabel 4
Ruang Lingkup Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi

No	Ruang lingkup
1	Tidak ada diskriminasi pelayanan pada unit layanan
2	Tidak ada pelayanan diluar prosedur/kecurangan pelayanan pada unit layanan
3	Tidak ada permintaan imbalan uang/barang/fasilitas diluar ketentuan yang berlaku pada unit layanan
4	Tidak ada pungutan liar (pungli) pada unit layanan
5	Tidak ada percaloan/perantara tidak resmi pada unit layanan

Tabel 5 Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPAK	Mutu	Kinerja
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 2.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

BAB III PENGOLAHAN SURVEI

menunjukkan hasil pada indeks 3.88.

Analisis Hasil Survei A.

A.1. Indikator Tidak ada diskriminasi pelayanan pada unit layanan Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Tidak ada diskriminasi pelayanan pada unit layanan

Dari nilai indeks yang diperoleh, dapat tergambar bahwa pelayanan pada Pengadilan Tinggi Agama Kendari tidak terdapat diskriminasi pelayanan. Semakin besar indeks yang didapat mengindikasikan bahwa tidak ada diskriminasi pelayanan pada unit pelayanan. Semakin besar nilai indeks menggambarkan semakin baik kualitas pelayanan.

Tabel 6 Data Survei pada Indikator Tidak ada diskriminasi pelayanan pada unit layanan

		Jumlah	Persentase	Persentase Kumulatif
Valid	***	49	87,5%	87,5%
	***	7	12,5%	100%
	**	0	0%	100%
	*	0	0%	100%
	Total	56	100%	100%

A.2. Indikator Tidak ada pelayanan diluar prosedur/kecurangan pelayanan pada unit layanan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Tidak ada pelayanan diluar prosedur/kecurangan *pelayanan pada unit layanan* menunjukkan hasil pada indeks 3,89. Dari nilai indeks yang diperoleh dapat tergambar bahwa tidak ada pelayanan diluar prosedur / kecurangan pada Pengadilan Tinggi Agama Kendari.

Tabel 7 Data Survei pada Indikator Tidak ada pelayanan diluar prosedur/kecurangan pelayanan pada unit layanan

		Jumlah	Persentase	Persentase Kumulatif
Valid	***	50	89,3%	89,3%
	***	6	10,8%	100%
	**	0	0%	100%
	*	0	0%	100%
	Total	56	100%	100%

A.3. Indikator Tidak ada permintaan imbalan uang/barang/fasilitas diluar ketentuan yang berlaku pada unit layanan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Tidak ada permintaan imbalan uang/barang/fasilitas diluar ketentuan yang berlaku pada unit layanan menunjukkan hasil pada indeks 3,92.

Dari nilai indeks yang diperoleh dapat tergambar bahwa tidak permintaan uang / barang / fasiitas diluar ketentuan yang berlaku pada Pengadilan Tinggi Agama Kendari.

Tabel 8 Data Survei pada Indikator Tidak ada permintaan imbalan uang/barang/fasilitas diluar ketentuan yang berlaku pada unit layanan

		Jumlah	Persentase	Persentase Kumulatif
Valid	***	52	92,9%	92,9%
	***	4	7,2%	100%
	**	0	0%	100%
	*	0	0%	100%
	Total	56	100%	100%

A.4. Indikator Tidak ada pungutan liar (pungli) pada unit layanan Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Tidak ada pungutan liar (pungli) pada unit layanan menunjukkan hasil pada indeks 3,93

Dari nilai indeks yang diperoleh, dapat tergambar bahwa tidak ada pungutan liar pada Pengadilan Tinggi Agama Kendari. Semakin besar nilai indeks, menggambarkan semakin baik kualitas pelayanan pada unsur ini.

Tabel 9
Data Survei pada Indikator
Tidak ada pungutan liar (pungli) pada unit layanan

		Jumlah	Persentase	Persentase Kumulatif
Valid	***	52	92,9%	92,9%
	***	4	7,2%	100%
	**	0	0%	100%
	*	0	0%	100%
	Total	56	100%	100%

A.5. Indikator Tidak ada percaloan/perantara tidak resmi pada unit layanan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator *Tidak ada percaloan/perantara tidak resmi pada unit layanan* menunjukkan hasil pada indeks 3,94.

Dari nilai indeks yang diperoleh, dapat tergambar bahwa tidak ada praktik percaloan / perantara tidak resmi pada Pengadilan Tinggi Agama Kendari. Semakin besar nilai indeks, menggambarkan semakin baik kualitas pelayanan pada unsur ini.

Tabel 10
Data Survei pada Indikator
Tidak ada percaloan/perantara tidak resmi pada unit layanan

		Jumlah	Persentase	Persentase Kumulatif
Valid	***	53	94,7	94,7
	***	3	5,4%	100%
	**	0	0%	100%
	*	0	0%	100%
	Total	56	100%	100%

Tabel 11 Indeks Persepsi Anti Korupsi Pengadilan Tinggi Agama Kendari

No	Unsur Pertanyaan	Indeks
Q 1	Tidak ada diskriminasi pelayanan	3,88
Q 2	Tidak ada pelayanan diluar prosedur/kecurangan pelayanan	3,89
Q 3	Tidak ada permintaan imbalan uang/barang/fasilitas diluar ketentuan yang berlaku	3,93
Q 4	Tidak ada pungutan liar (pungli)	3,93
Q 5	Tidak ada percaloan/perantara tidak resmi	3,95
	3,91	

Indeks 3,91 tersebut jika dikonversikan dalam tabel persepsi di bawah ini, maka skor indeks tersebut masuk pada persepsi kinerja unit pelayanan BERSIH DARI KORUPSI. Nilai interval konversi Indeks Persepsi Anti Korupsi berada pada angka 97,50.

Tabel 17 Mutu Pelayanan

INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI (IPAK)
PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI
PERADILAN AGAMA
PEKAN SURVEI
TAHUN 2024

NILAI IPAK

3,91

NILAI INTERVAL KONVERSI

97,50

RESPONDEN

JUMLAH : 56

JENIS KELAMIN : L = 49 / P = 7 PENDIDIKAN : SD =

SD = 0 SMP = 0

SMA = 1

DIPLOMA = 0

S1 = 44

S2 = 17

S3 = 0

PERIODE SURVEI

22 April 2024 s/d 03 Mei 2024

TERIMA KASIH ATAS PENILAIAN YANG TELAH ANDA BERIKAN MASUKAN ANDA SANGAT BERMANFAAT UNTUK KEMAJUAN UNIT KERJA KAMI DEMI MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN

Tabel 18 Interval Nilai Persepsi Anti Korupsi

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI IPAK	MUTU	KINERJA
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 62.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 –100.00	4	Bersih dari korupsi

Selain memberikan output skor Indeks Persepsi Anti Korupsi, survei yang dilakukan ini juga menjaring masukan dari responden berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan pelayanan di Pengadilan Tinggi Agama Kendari. Adapun masukan dari responden adalah sebagai berikut :

Tabel 19 Isian Masukan dan Pandangan Pengguna Layanan Pengadilan Tinggi Agama Kendari

No	Masukan dan Pandangan Pengguna Layanan Pengadilan Tinggi Agama Kendari
1	Tingkatkan kualitas pelayanan
2	Sudah bagus agar dipertahankan
3	Terus memberikan pelayanan maksimal
4	Sukses selalu Semoga lebih baik lagi

B. **Tindak Lanjut Hasil Survei**

Pelaksanaan hasil survei yang dilakukan di Pengadilan Tinggi Agama Kendari pada pekan survei tahun 2024 berada pada kategori "BERSIH DARI KORUPSI". Semua unsur penilaian mengalami peningkatan dari penilaian sebelumnya.

Dalam rangka mempertahankan dan tetap meningkatkan kualitas masing - masing indikator, Pengadilan Tinggi Agama Kendari telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

B.1. Tindak lanjut yang telah dilakukan

Telah dilakukan tindak lanjut dengan mengimplementasikan monitoring dan evaluasi (monev) petugas PTSP setiap bulan. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap petugas tetap menjaga standar pelayanan yang tinggi, serta memberikan ruang bagi perbaikan dan peningkatan berkelanjutan. (Lampiran)

B.2. Rencana Tindak lanjut

- 1. Memberikan briefing kepada petugas pelayanan agar memberikan pelayanan dengan tidak melakukan diskriminasi kepada Masyarakat yang membutuhkan pelayanan pada Pengadilan Tinggi Agama Kendari.
- 2. Memberikan *briefing* kepada petugas pelayanan agar tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun dari penerima layanan untuk mendapatkan perlakukan atau fasilitas yang lebih.
- 3. Menyediakan sarana prasarana untuk penerima layanan disabilitas

BAB IV DATA SURVEI

A. Hasil Survei Dari Aplikasi Sisurti

Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi di Pengadilan Tinggi Agama Kendari pada periode 22 April – 03 Mei tahun 2024 berhasil meraih kategori mutu "BEBAS DARI KORUPSI" dengan nilai indeks sebesar 3,91 berdasarkan nilai indeks Persepsi Anti Korupsi yang diperoleh dari perhitungan dan analisis data survei serta perhitungan yang didapatkan dari aplikasi Sisurti.

B. Data Responden

Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi di Pengadilan Tinggi Agama Kendari periode 22 April – 03 Mei tahun 2024 diikuti oleh 56 responden yang seluruhnya merupakan pengguna layanan di Pengadilan Tinggi Agama Kendari. Adapun data dari para responden SPAK di periode 22 April – 03 Mei tahun 2024 adalah sebagai berikut:

DATA SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI

Periode Triwulan 2 Tahun 2024

	Tenade II			
No	Nama	Telp	Email	Jenis Layanan
	1 MUHAMMAD TANZIL, SH	08******0012	ta********04@gmail.com	Layanan pembinaan dan Pengawasan
	2 Nur Alam, Ar, s. Ag	08*******7783	nu************ab@gmail.com	Layanan pembinaan dan Pengawasan
	3 La Sahari	08******5194	la*******01@gmail.com	Layanan pembinaan dan Pengawasan
	4 Sumarum	08*******0097	ab******a5@gmail.com	Layanan penyelesaian perkara
	5 M. Akbar Amin, S.H	08******1527	mu*********16@gmail.com	Layanan penyelesaian perkara
	6 Muhammad Rehadis Tofa, SH	08******5114	ra****08@gmail.com	Layanan penyelesaian perkara
	7 Salahudin	08******2073	sa************lo@gmail.com	Layanan pembinaan dan Pengawasan
	8 Lily Rahmi	08*******0555	li*********18@gmail.com	Layanan penyelesaian perkara
	9 sudirman	08*******3143	su****an@gmail.com	Layanan pembinaan dan Pengawasan
	10 Rinayanti	08******1185	ri*** 44@y ahoo.co.id	Layanan pembinaan dan Pengawasan
	11 Hasdin	08******5871	ha*********ry@gmail.com	Layanan pembinaan dan Pengawasan
	12 Lande Azwar Tanda, S.H	08******4800	la*******da@gmail.com	Layanan pembinaan dan Pengawasan
	13 Miftah Faris	08*******0500	mi*****************pa@gmail.com	Layanan pembinaan dan Pengawasan
	14 Mohammad Fadhil	08*******0000	mo*******il@gmail.com	Layanan pembinaan dan Pengawasan
	15 Anwar	08******7161	an********ud@gmail.com	Layanan pembinaan dan Pengawasan
	16 Alvin Syah Kurniawan	08******7725	al*****89@gmail.com	Layanan pembinaan dan Pengawasan
	17 La Mahana, S Ag	08********8817	ma********31@gmail.com	Layanan penyelesaian perkara
	18 junaid		ju**********48@gmail.com	Layanan pembinaan dan Pengawasan
	19 andinazmah	08********8422	an******ah@gmail.com	Layanan pembinaan dan Pengawasan
	20 Eka Yunita Dian Pratiwi	08******9706	ek*******dp@gmail.com	Layanan pembinaan dan Pengawasan
	21 Rini Surastika Tawulo	08*******9959	ri********ka@gmail.com	Layanan pembinaan dan Pengawasan
	22 Andi Sapada, S.Kom	08******7721	an*********84@gmail.com	Layanan pembinaan dan Pengawasan
	23 LA ODE MUHAMMAD AHYA SYAWAL	08*******0752	la******ya@gmail.com	Layanan pembinaan dan Pengawasan
	24 Harman H. Montilamo	08******5437	mo*******an@gmail.com	Layanan pembinaan dan Pengawasan
	25 Hamsin Haruna	08******2448	ha*****un@gmail.com	Layanan pembinaan dan Pengawasan
	26 Abd Jabbar, S Ag	08******3212	ja********lo@gmail.com	Layanan penyelesaian perkara
	27 La Ode Muhamad Masuddin Alimuddin,S.IP	08******1399	la*********20@gmail.com	Layanan penyerahan produk pengadilan
	28 APIT BUTSIYANA, S.H.	08******5357	ad****** 79@gmail.com	Layanan penyelesaian perkara
	29 H.A.dam,S.Ag	08******1512	ad****** 31@gmail.com	Layanan pembinaan dan Pengawasan
	30 AbdulJaris Daud	08********8669	ab********ud@mahkamahagunggo.id	Layanan pembinaan dan Pengawasan
	31 Joko Santoso	08*******9098	jo*****37@gmail.com	Layanan penyelesaian perkara
	32 Bustamin Usmar	08********8992	n.*********14@gmail.com	Layanan pembinaan dan Pengawasan
	33 Dedysupriadi	08*******7446	de****45@gmail.com	Layanan pembinaan dan Pengawasan
			_	

34 Sudirman M	08******1173	su********hi@yahoo.co.id	Layanan pembinaan dan Pengawasan
35 Hsyamsulfahrudin	08******4455	pe*****k7@gmail.com	Layanan penyerahan produk pengadilan
•	08*******	id***********68@gmail.com	
36 Drs Idris,S.H.,M.H			Layanan penyelesaian perkara
37 Riswan Sofyan	08******5555	ri*********il@gmail.com	Layanan pembinaan dan Pengawasan
38 Muammar Hasnawir	08*******7028	ha**********r1@gmail.com	Layanan pembinaan dan Pengawasan
39 Asep Kurniawan	08******5608	æ*************31@gmail.com	Layanan pembinaan dan Pengawasan
40 Kamariah sunusi	08 ***** 4 8 7 5	ia****** ue@gmail.com	Layanan pembinaan dan Pengawasan
41 Syafardin Jumain	08******0319	sy********in@gmail.com	Layanan pembinaan dan Pengawasan
42 M Kamaruddin Amri	08*******0041	un******ss@gmail.com	Layanan pembinaan dan Pengawasan
43 Hariady hasan toi	08******1077	ha****** 99@gmail.com	Layanan pembinaan dan Pengawasan
44 HALIFUL BAHRI	08******5167	ha**********86@gmail.com	Layanan permohonan infomasi dan Layanan pengaduan
45 Badirin	08*******0393	ba*** in@ymail.com	Layanan pembinaan dan Pengawasan
46 La Ode Muhammad Akhmar	08*******0385	bu* * * * * 97@gmail.com	Layanan pembinaan dan Pengawasan
47 La Saleda	08 ****** 9 7 84	la****da@gmail.com	Layanan pembinaan dan Pengawasan
48 Maemunah R, S.H.I	08******5367	ma***********ka@gmail.com	Layanan pembinaan dan Pengawasan
49 Adnan	08******4137	ad**********11@gmail.con	Layanan permohonan infomasi dan Layanan pengaduan
50 Zulkifli	08 ****** 83 7 8	k z*****71@ gmail.com	Layanan permohonan infomasi dan Layanan pengaduan
51 Akbar M, S.Kom	08*******7393	ak****** pw@gmail.com	Layanan permohonan infomasi dan Layanan pengaduan
52 Hasan Ashari	08******6526	h4** *81@gmail.com	Layanan pembinaan dan Pengawasan
53 Miftakul Khoriyah	08 ******7 053	mi********53@gmail.com	Layanan permohonan infomasi dan Layanan pengaduan
54 Muh. Idris Abdullah	08********7770	mu***********h0@gmail.com	Layanan pembinaan dan Pengawasan
55 Asfin	08******5637	ma*****te@yahoo.com	Layanan permohonan infomasi dan Layanan pengaduan
56 Ansar, SH	08******5444	an****h3@gmail.com	Layanan penyelesaian perkara

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil survei Persepsi Anti Korupsi yang telah dilakukan Pengadilan Tinggi Agama Kendari diperoleh informasi bahwa pada Pengadilan Tinggi Agama Kendari memiliki Indeks Persepsi Anti Korupsi yaitu 3,91 atau masuk pada kategori **BERSIH DARI KORUPSI.**

Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 5 indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut:

- 1. Indikator Tidak ada diskriminasi pelayanan pada unit layanan, mendapat indeks 3,88.
- 2. Indikator Tidak ada pelayanan diluar prosedur / kecurangan pelayanan pada unit layanan, mendapat indeks 3,89
- 3. Indikator Tidak ada permintaan imbalan uang/barang/fasilitas diluar ketentuan yang berlaku pada unit layanan, mendapat indeks 3,93.
- 4. Indikator angka Tidak ada pungutan liar (pungli) pada unit layanan, mendapat indeks 3,93.
- 5. Indikator Tidak ada percaloan/perantara tidak resmi pada unit layanan, mendapat indeks 3,95.

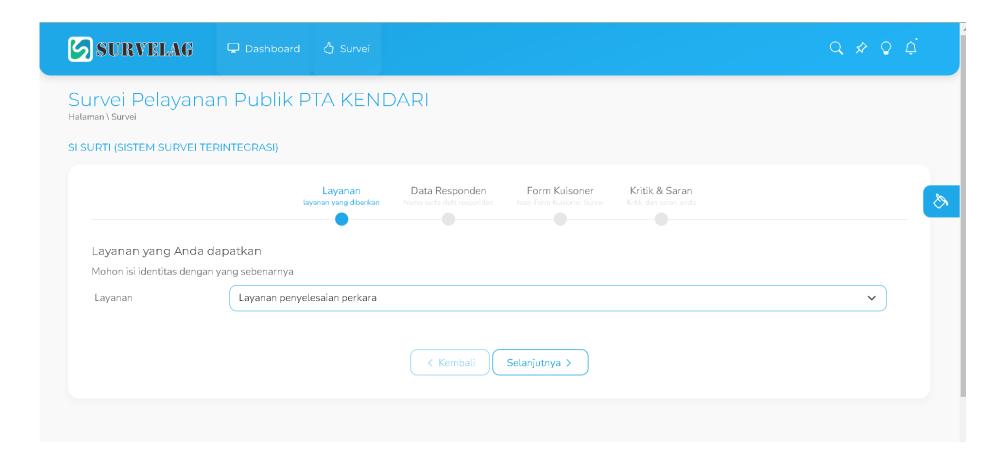
B. Rekomendasi

Merujuk pada hasil indeks persepsi anti korupsi pada setiap indikator terhadap pelayanan di Pengadilan Tinggi Agama Kendari Tahun 2024 pada pekan survei diatas, menunjukkan bahwa mayoritas indikator memiliki indeks di atas 3,91 atau masuk pada kategori bersih dari korupsi.

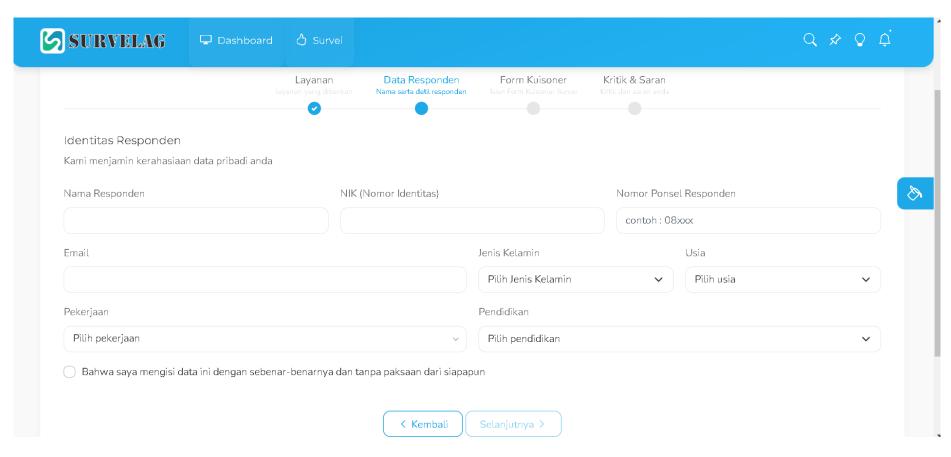
Agar tetap dipertahankan hasil yang baik ini serta tetap selalu melakukan penguatan integritas seluruh aparat Pengadilan Tinggi Agama Kendari demi terwujudnya Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

LAMPIRAN

MENU PENGISIAN LAYANAN INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI PADA APLIKASI SISURTI



MENU PENGISIAN DATA PROFIL RESPONDEN INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI PADA APLIKASI SISURTI



MENU PENGISIAN SURVEI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUSPI PADAA APLIKASI SISURTI

